



GUBERNUR JAWA TIMUR

**NOTA PENJELASAN GUBERNUR
MENGENAI
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

SURABAYA, 27 MARET 2017

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG KAMI HORMATI,

- Sdr. Ketua dan Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Sdr. Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Sdr. Para Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Sdr. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Serta Para Hadirin dan Undangan Yang Berbahagia.

Mengawali agenda sidang paripurna penyampaian laporan tahun 2016 pada hari ini, pertama-tama marilah sejenak kita memanjatkan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-NYA kepada kita semua sehingga pada hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan serta kesabaran di dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks ditengah kondisi perekonomian global dan nasional yang belum pulih.

Sebelum saya menyampaikan nota penjelasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 terlebih dahulu izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Yang Terhormat Ketua Dewan dan Para Pimpinan Dewan beserta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur yang di awal sidang paripurna pada hari ini telah berkenan hadir memenuhi jumlah kuorum yang ditentukan.

Semoga agenda sidang paripurna penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 dapat dilanjutkan hingga ke tahap akhir yaitu penyampaian rekomendasi perbaikan DPRD kepada kami selaku Gubernur Jawa Timur.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Perlu kami informasikan bahwa penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan laporan capaian kinerja kami **tahun kedua** dari masa bakti 5 tahun sebagai Kepala Daerah. Sebelum kami sampaikan laporan tahun 2016 izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait isu yang berkembang di Jawa Timur. Beberapa diantaranya patut menjadi perhatian kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk ditindaklanjuti karena mengindikasikan permasalahan krusial yang dapat menjadi isu strategis kedepan.

Mengawali pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur tahun 2016, Pemerintah Provinsi menghadapi 3 (tiga) permasalahan pokok. **Pertama**, belum pulihnya perekonomian global dan nasional yang berimplikasi terhadap perekonomian Jawa Timur. **Kedua**, ketidakpastian proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah yang berakibat ditetapkannya kebijakan efisiensi anggaran daerah. **Ketiga**, diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang substansinya mengatur tentang perubahan kewenangan urusan di Pusat dan Daerah sehingga terjadi perubahan dalam bentuk penambahan dan atau pengurangan nomenklatur Perangkat Daerah (PD), terutama di provinsi harus dilakukan penataan organisasi secara keseluruhan. Beberapa permasalahan

yang mengiringi perjalanan tahun 2016 disampaikan sebagai berikut.

Pertama, permasalahan belum pulihnya perekonomian global yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah. Bagaimanapun Jawa Timur turut terkena imbasnya sehingga pada beberapa indikator kinerja makro ekonomi ada sedikit pelambatan, namun masih tetap terjaga di kisaran nilai positif.

Penurunan ini dipicu oleh turunnya penerimaan negara dari sektor migas, khususnya ekspor minyak mentah ke negara-negara pengimpor migas terbesar. Misalnya Amerika yang konsumsinya mencapai sebesar 20 persen lebih. Penurunan terjadi akibat dari kebijakan embargo minyak yang memaksa Amerika Serikat meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan dalam negerinya. Terkait dengan kebijakan embargo Pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 15 Desember 2015 mencabut larangan ekspor minyak mentah ke negara lain, persediaan minyak mentah tahun 2016 di pasar dunia terjadi over produksi. Akibatnya harga minyak mentah di pasar dunia turun mencapai level terendah sebesar 29,29 US Dollar per barel di perdagangan Asia, sedangkan di APBN Tahun 2016 dipatok sebesar 50,07 US Dollar per barel.

Menghadapi permasalahan ini pemerintah telah mengambil langkah penyelamatan anggaran dengan mengeluarkan kebijakan efisiensi yang salah satunya diarahkan pada pos belanja yang bersifat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah sebagai

solusi. Yaitu melalui pengurangan pada pos belanja transfer fiskal kepada daerah. Mengingat pos belanja yang dialokasikan menurut fungsi dan jenis belanja pada APBN merupakan anggaran “baku” yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah yang harus dilaksanakan karena memiliki konsekuensi tanggung jawab.

Pengurangan alokasi dana transfer fiskal dari pusat kepada daerah Provinsi Jawa Timur memang bukan alasan utama bagi Pemerintah Provinsi untuk tidak menyelenggarakan pemerintahan daerah pada 2016. Tetapi secara kuantitatif jumlah anggaran pada pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang terbatas atau tidak sebanding dengan jumlah program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai kompleksitas permasalahan krusial di Jawa Timur. Dengan adanya pengurangan stimulan anggaran tersebut, tentu hal ini bisa mempengaruhi kapasitas dan kemandirian anggaran daerah dalam upayanya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target indikator kinerja utama tahun 2014-2019.

Kedua, perumusan dan penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khususnya sektor pajak daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal diantaranya adalah dinamika kondisi perekonomian nasional, kebijakan regulasi dan anggaran pemerintah pusat yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah,

khususnya dari sektor pajak daerah, sehingga kebijakan penetapan target pendapatan asli daerah, lebih mengedepankan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, ketimbang mengejar tingkat pertumbuhan pendapatan secara progresif. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2016 adalah fluktuasi harga jual bahan bakar minyak yang ditentukan oleh pemerintah sepanjang tahun 2016 sebanyak enam kali, membuat harga jual BBM tahun 2016 secara akumulatif lebih rendah 3,33 persen apabila dibandingkan dengan harga jual BBM pada tahun 2015. Kemudian adanya trend pergeseran pilihan varian kendaraan bermotor baru baik roda dua maupun roda empat, yang berakibat pada realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 112,44 persen.

Ketidaksesuaian pada perkiraan penerimaan daerah tahun 2016 yang terdeteksi dan diyakini akan mengurangi penerimaan daerah atau APBD Provinsi Tahun 2016 tentu berimplikasi terhadap kebijakan otorisasi anggaran untuk mempedomani prinsip dan fungsi anggaran, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran daerah pada tahun 2016, khususnya melalui pengurangan alokasi dana program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah (PD), yang besarnya mencapai antara 10 persen hingga 20 persen.

Untuk kebijakan pengurangan anggaran program dan kegiatan di saat tahun berjalan bagi PD yang memiliki urusan wajib dan pilihan yang sifatnya teknis yang merupakan kebutuhan vital serta mendasar

tentu ada dampak internal karena tidak bisa leluasa di dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Apalagi bila pengurangan yang signifikan dilakukan pada PD yang secara fungsi memiliki kontribusi cukup besar terhadap indikator kinerja utama Jawa Timur, sehingga tidak dapat menjalankan program *given*, program prioritas maupun program pencapaian visi dan misi kepala daerah yang setiap tahun target yang terus meningkat. Sangat berbeda apabila pengurangan dilakukan pada PD yang sifatnya bukan pendukung utama pencapaian visi dan misi Gubernur, tentu pengaruhnya tidak signifikan.

Permasalahan ini memang bukanlah persoalan baru dalam hal perencanaan dan penganggaran, tetapi secara riil dalam tinjauan aspek implementasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan di daerah, tidak dipungkiri apabila kekuatan anggaran bisa menjadi prinsip sekaligus modal dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar capaian kinerja lebih berkualitas sesuai yang diharapkan. Karena bagaimanapun juga bagi PD yang berada dalam tataran strategis memiliki permasalahan mendasar dan merupakan kebutuhan vital yang harus dapat dituntaskan dalam waktu segera. Karena itu kekuatan sumber daya anggaran sebagaimana motto Jawa Timur “*Jer Basuki Mawa Beya*” menjadi penting karena bisa mempengaruhi upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan dua permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencermati dan mengkaji capaian kinerja seluruh PD secara berkala. Dalam realitasnya, diperoleh kesimpulan bahwa penetapan target-target IKU pada 2014, saat kondisi makro sosial dan ekonomi Jawa Timur tumbuh relatif tinggi. Rasanya sangat tidak logis apabila kemudian untuk mencapai target 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun menetapkan target-target IKU dalam menyusun RPJMD Tahun 2014-2019 dengan nilai kisaran dibawahnya.

Berdasar pemikiran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan besaran target-target tahunan dengan landasan rasa optimis dan semangat yang berlebihan sehingga tidak disadari bahwa kondisi makro sosial dan ekonomi Jawa Timur dapat berubah. Apalagi, posisinya mudah dipengaruhi oleh kondisi eksternal, baik kondisi perekonomian nasional, regional Asia maupun global. Memahami kondisi perekonomian yang fluktuatif, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur senyampang periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 baru berjalan 2 tahun perlu mengambil sikap logis yang bersifat rekonsiliasi dengan meminta komitmen dukungan legislatif mengubah RPJMD yang lebih realistis untuk menjawab isu saat ini. Perubahan ini penting, mengingat filosofi perencanaan secara keseluruhan substansinya harus disusun secara realistis.

Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat yang

dapat menerima pengajuan perubahan dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 oleh eksekutif melalui tahapan pembahasan dalam sidang paripurna panitia khusus (pansus) dengan memberikan dukungan baik berupa pendapat, kritik, saran maupun masukan mengenai substansi materi perubahan RPJMD.

Memahami besaran target-target 8 (delapan) IKU Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2014-2019 yang kurang realistis maka dalam penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2016 ini, seluruh capaian kinerja makro sosial dan ekonomi Jawa Timur yang kami laporkan tidak kami bandingkan dengan target-target 8 (delapan) IKU yang ditetapkan. Melainkan kami membandingkannya dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian kinerja PD secara keseluruhan tetap dapat diukur dan hasilnya lebih mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Terkait dengan hal itu, kami mohon dapatnya untuk dimaklumi bersama oleh segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

Ketiga, diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya mengatur tentang perubahan kewenangan urusan di pusat dan daerah. Dalam tataran reformasi birokrasi, perundangan itu memang sangat diharapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi disisi lain, implikasi dari implementasi

peraturan ini, tentu diperlukan kesiapan penyesuaian dalam hal kapasitas sumber daya yang dimiliki dengan dukungan perangkat regulasi, kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana, infrastruktur, anggaran serta sumber daya manusianya yang representatif.

Diawal penyesuaian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur seolah sedang menghadapi dilema terkait dengan perubahan kewenangan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Sebab, bagaimanapun hal ini mengandung konsekuensi logis apabila kewenangan urusan sudah beralih, tetapi dalam realitasnya terdapat perbedaan prinsip kebijakan yang diatur di daerah kabupaten/kota dengan ketetapan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota. Sebagai ilustrasi di bidang pendidikan lanjutan tingkat atas (SMA/SMK). Sebelumnya pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan biaya operasional sekolah secara gratis, tetapi sejak dialihkan menjadi kewenangan provinsi, kebijakan gratis masih perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan lebih jauh, mengingat ada konsekuensi besarnya anggaran yang harus dialokasikan. Peralihan ini jelas menjadi beban Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dipikirkan bersama oleh eksekutif dan legislatif secara hati-hati. Karena itu, dengan adanya tambahan kewenangan urusan yang diikuti dengan alokasi anggaran APBD, pemerintah provinsi tetap dapat menjalankan amanat peraturan perundangan sekaligus mampu mencapai target-target IKU Jawa Timur yang disesuaikan melalui Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk mengatasi persoalan perbedaan kebijakan kepala daerah, tentu Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera menyikapi hal ini secara bijak agar tidak terus berkepanjangan dan yang lebih penting tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum secara merata dan berkeadilan bisa dipenuhi.

Pelimpahan urusan kewenangan sepiantas memang terlihat mudah dan sederhana. Namun, dalam prakteknya, banyak akibat dan implikasi yang menjadi kewajiban PD untuk menyiapkan seluruh perangkat dan instrumen yang dibutuhkan dengan cepat dan dalam waktu yang terbatas, baik mencakup regulasi, kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun infrastrukturnya.

Sebagai contoh pelimpahan kewenangan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi seperti yang terjadi di urusan pertambangan. Sebelumnya, pemerintah daerah kabupaten/kota sudah melakukan proses dan mekanisme permohonan izin pertambangan yang diajukan oleh masyarakat umum, tetapi hingga berlakunya pelimpahan, persetujuannya belum juga turun. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah provinsi dalam upaya memberikan tingkat pelayanan yang cepat kepada masyarakat di daerah kabupaten/kota dengan standarisasi sesuai yang ditetapkan.

Selain itu, dilema dirasakan oleh seluruh jajaran Pemerintah

Provinsi Jawa Timur saat melakukan perubahan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Ternyata, perubahannya tidak sekedar mengganti regulasi sebagai dasar hukumnya dan nama institusi, tetapi mencakup hal krusial lain seperti perubahan kelembagaannya, baik struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta sarana dan prasarana. Disamping itu juga terkait dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan, penataan sumber daya manusia, dan sebagainya. Semua perubahan-perubahan tersebut memang ditetapkan di akhir tahun 2016. Akan tetapi, mengingat pelaksanaannya baru diimplementasikan mulai tahun 2017, kami tidak menyampaikannya dalam laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,

Laporan pertanggungjawaban tahun 2016 ini disampaikan dalam rangka untuk memenuhi amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa seorang kepala daerah selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kepada Masyarakat. Ketentuan Undang-Undang dimaksud secara operasional telah diatur dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dengan perihal yang sama.

Hal yang mendasari dalam penyusunan materi laporan akhir tahun anggaran 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran pelaksanaan dokumen RPJMD. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa materi laporan yang dilaporkan adalah dokumen RKPD Tahun 2016 adalah dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Mengingat dokumen RKPD memuat program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, hal ini mengandung arti bahwa materi laporan yang dipertanggungjawabkan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang disepakati bersama dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/07/NK/013/2015 dan Nomor: 160/07/NK/060/2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 serta Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/5/NK/013/2016 dan Nomor 188/5/NK/060/2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya, kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif mengenai kebijakan dan plafon prioritas anggaran menjadi landasan hukum dalam menjalankan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Ketentuan Peraturan Daerah ini kemudian dilengkapi dengan landasan operasional, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, yang dalam pelaksanaannya digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur tahun 2016. Hasil implementasinya merupakan 8 (delapan) target IKU Jawa Timur tahun 2016. Karena itu, perlu kami sampaikan juga dalam laporan ini sebagai konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,

Berkaitan dengan beberapa landasan hukum yang saya sampaikan, sesuai dengan penjelasan pasal 18 - 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 mengenai materi LKPJ Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban Gubernur terhadap pelaksanaan dokumen RKPD Tahun 2016.

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015, dengan tema PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) AKHIR 2015. Tema ini sinergis dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang RKP Tahun 2016 yaitu *“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”*.

Fokus tema ini diambil dengan pertimbangan sebagai penjabaran fokus kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, juga diletakkan fondasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melalui pembangunan infrastruktur secara merata dan seimbang dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah agar mampu menghadapi persaingan pasar tenaga kerja di Asia Tenggara. Selain itu, pengaruh belum stabilnya perekonomian global yang berimbas melambatnya pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur, perlu dilakukan upaya

lain untuk dapat memperkuat kapasitas sumber daya melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial serta dukungan administratif sebagai landasan operasional sekaligus *guidance*-nya.

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama dalam pembangunan berkualitas. Pembangunan yang ditujukan untuk membangun manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas. Karena itu, dalam aktivitas pembangunan nanti tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan ekosistem guna menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dukungan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur yang merupakan salah satu potensi besar bidang investasi sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian agenda prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri. Percepatan pembangunan terhadap kelima agenda prioritas tersebut sangat *urgent* dilakukan karena memiliki sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Diharapkan, peningkatan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur yang berdampak *multiplier effect* akan mempercepat pertumbuhan di beberapa sektor strategis yang cukup tinggi dan bisa

menurunkan jumlah kemiskinan di provinsi ini. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka, bisa diturunkan secara signifikan.

Dalam konteks Jawa Timur, upaya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah strategis selain digunakan untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas, juga untuk mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur agar siap menghadapi pasar persaingan bebas dengan 10 (sepuluh) negara ASEAN.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan kekuatan APBD total seluruhnya untuk sisi pendapatan mencapai sebesar 25,04 triliun rupiah lebih atau 104,67 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 23,92 triliun rupiah lebih. Rincian selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 14,62 triliun rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 15,90 triliun rupiah lebih atau sebesar 108,73 persen. Perolehan realisasi Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar 12,77 triliun rupiah lebih atau 107,02 persen, Retribusi Daerah sebesar 133,58 miliar rupiah lebih atau 111,65 persen. Kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 364,32 miliar rupiah lebih atau 100 persen serta dari Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah sebesar 2,63 triliun rupiah lebih atau 119,24 persen.

II. Dana Perimbangan

Penerimaan daerah dari dana perimbangan tahun 2016 ditargetkan sebesar 9,23 triliun rupiah lebih, realisasinya mencapai sebesar 9,03 triliun rupiah lebih atau 97,86 persen. Realisasinya masing-masing dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 1,84 triliun rupiah lebih atau 94,39 persen. Kemudian dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,67 triliun rupiah lebih atau 100 persen dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 5,51 triliun rupiah lebih atau 98,43 persen.

III. Penerimaan dari Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ditargetkan sebesar 67,38 miliar rupiah lebih terealisasi sebesar 105,32 miliar rupiah lebih atau 156,29 persen. Realisasinya masing-masing dari Penerimaan Pendapatan Hibah mencapai sebesar 42,95 miliar rupiah lebih atau 128,24 persen dan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 62,36 miliar rupiah lebih atau 184,03 persen.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

Berdasarkan pada kekuatan anggaran tersebut, dialokasikan pengeluaran untuk pos **Belanja Daerah** total target mencapai sebesar 24,61 triliun rupiah lebih dan realisasinya sebesar 23,87 triliun rupiah lebih atau 96,99 persen, dengan rincian sebagai berikut:

I. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun 2016 dialokasikan sebesar 16,84 triliun rupiah lebih dan realisasinya sebesar 16,38 triliun rupiah lebih atau 97,23 persen. Masing-masing dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar 2,51 triliun rupiah lebih dan realisasi mencapai sebesar 2,32 triliun rupiah lebih atau 92,71 persen. Kemudian untuk Belanja Bunga dialokasikan sebesar 1,78 miliar rupiah lebih terealisasi sebesar 1,75 miliar rupiah lebih atau 98,06 persen. Selanjutnya, untuk Belanja Hibah dialokasikan sebesar 7,37 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 7,22 Trilyun lebih atau 97,94 persen. Kemudian untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar 10,80 miliar rupiah terealisasi sebesar 8,74 miliar rupiah lebih atau 81,00 persen. Selanjutnya untuk Belanja Bagi Hasil dialokasikan sebesar 5,03 triliun rupiah lebih realisasinya mencapai sebesar 5,01 triliun rupiah lebih atau 99,67 persen, sedangkan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 1,81 triliun rupiah lebih realisasinya sebesar 1,78 triliun rupiah lebih atau 98,21 persen dan untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar 100 miliar rupiah terealisasi sebesar 19,47 miliar rupiah lebih atau 19,47 persen.

II. Belanja Langsung

Pada belanja Langsung dialokasikan sebesar 7,76 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 7,49 triliun rupiah lebih atau sebesar

96,46 persen, dengan rincian untuk Belanja Pegawai dialokasikan sebesar 600,71 miliar rupiah lebih terealisasi sebesar 562,836 miliar rupiah lebih atau 93,69 persen, sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar 4,88 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 4,78 triliun rupiah lebih atau 97,77 persen serta untuk Belanja Modal dialokasikan sebesar 2,27 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 2,15 triliun rupiah lebih atau 94,36 persen.

Selanjutnya, dari sisi **Pembiayaan Daerah** tahun 2016 dialokasikan sebesar 688,67 miliar rupiah lebih telah terealisasi sebesar 688,67 miliar rupiah lebih atau 100,00 persen. Dari pos penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari SILPA Daerah tahun sebelumnya sebesar 1,49 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,49 triliun rupiah lebih atau 100,00 persen.

Dari penerimaan ini dipergunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2016 sebesar 808,33 miliar rupiah lebih, terealisasi sebesar 808,33 miliar rupiah lebih atau 100 persen.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Berkaitan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2016 pada sidang paripurna hari ini, secara keseluruhan akan kami sampaikan dalam 3 (tiga) buku laporan.

Buku laporan yang pertama mengenai Nota Penjelasan

Gubernur kepada DPRD Provinsi, yang intinya menjelaskan secara ringkas capaian kinerja 8 (delapan) IKU Jawa Timur dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016, cerminan dari capaian kinerja seluruh PD sebagai representasi kinerja gubernur tahun 2016.

Buku laporan kedua berisi materi pelaporan realisasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yang dihasilkan seluruh PD yang secara garis besar mencerminkan kontribusi capaian kinerja gubernur tahun 2016, baik karena kedudukan dan kewenangannya sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah Jawa Timur. Buku laporan ini secara sistematis disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 khususnya pasal 18 yang meliputi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Buku laporan ketiga merupakan buku lampiran sebagai pelengkap buku laporan kedua yang memperlihatkan realisasi capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing PD.

Perlu kami informasikan kepada Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat bahwa ketiga buku laporan yang kami sampaikan ini merupakan satu kesatuan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2016 yang saling terkait dan memiliki korelasi

keterpaduan dan terintegrasi dalam implemenasinya.

Selanjutnya, sesuai ketentuan tata tertib persidangan DPRD sebelum agenda sidang paripurna penyampaian laporan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Maret 2017 Nomor: 045/2780/201.5/2017 perihal Penyampaian Buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 beserta *softcopy* dalam CD telah diserahkan secara lengkap kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat melalui Sekretariat Dewan sebagai buku pegangan dalam sidang paripurna perdana sekaligus sebagai bahan untuk melakukan telaah dan mengkaji serta memberikan masukan yang konstruktif guna perbaikan kinerja tahun 2017, yang saat ini sudah berjalan dan memasuki triwulan pertama.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Di awal sidang paripurna pada hari ini, saya selaku Gubernur Jawa Timur akan membacakan secara ringkas Nota Penjelasan Penyampaian LKPJ Tahun 2016 selengkapnya sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA,

REALISASI CAPAIAN 8 (DELAPAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5

(lima) tahun ke depan, didasarkan pada dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen RKPD Tahunan sebagai landasan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh PD daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depan, kami melaporkan hasil realisasi capaian kinerja 8 (delapan) IKU Jawa Timur membandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya, secara ringkas kami bacakan sebagai berikut:

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan amanat RKPD Tahun 2016, pembangunan Jawa Timur di bidang ekonomi diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial dan infrastruktur yang bersifat administratif. Pembangunan ekonomi di tengah belum pulihnya perekonomian global dan nasional sedikit banyak memang berpengaruh terhadap lambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Hal ini dapat ditunjukkan oleh besaran indikator makroekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Tahun 2016, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Kinerja PDRB selama 3 (tiga) tahun terakhir apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar 1.539,79 triliun

rupiah dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.692,90 triliun rupiah. Selanjutnya kondisi pada tahun 2016, PDRB ADHB Jawa Timur mencapai 1.855,04 triliun rupiah. Sedangkan bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar 1.262,70 triliun rupiah meningkat menjadi 1.331,31 triliun rupiah pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 menjadi 1.405,23 triliun rupiah.

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen, kemudian pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,44 persen, lalu pada tahun 2016 mencapai 5,55 persen. Kondisi tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Yaitu berturut-turut 5,02 persen (2014); 4,79 persen (2015); lalu 5,02 persen (2016).

Peningkatan pada besaran angka PDRB Jawa Timur tahun 2016 mencerminkan bahwa perekonomian daerah Jawa Timur tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah Jawa Timur memiliki kekuatan dan semakin kokoh.

Dari indikator tingkat Inflasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menekan laju tingkat inflasi tahun 2016 hingga mencapai 2,74 persen lebih rendah dibandingkan laju inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,08 persen. Kondisi ini merupakan inflasi tahunan yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir. Inflasi tahun 2016 ini

juga lebih rendah jika dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 3,02 persen.

Keberhasilan pencapaian laju inflasi ini merupakan upaya keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berani mengambil langkah inovasi kebijakan dengan menerapkan 5 (lima) strategi untuk mengatasi laju inflasi yang tinggi setiap tahunnya.

Kelima strategi tersebut, yaitu *Pertama*, melalui Penguatan kelembagaan, produksi, distribusi dan konektivitas, regulasi dan *monitoring*, kajian dan informasi hingga pengendalian ekspektasi. *Kedua*, melalui percepatan implementasi kerja sama antar daerah melalui berbagai langkah nyata. *Ketiga*, melalui penguatan peran BUMD kabupaten/kota dan provinsi sebagai lembaga *buffer* daerah. *Keempat*, dengan mendorong kerjasama antara perbankan dengan BUMD dalam penguatan permodalan. *Kelima*, dengan menjaga harga komoditas pangan dan beberapa komoditas lain, karena dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga menopang terkendalinya inflasi.

Kinerja pembangunan infrastruktur yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memang tidak serta-merta akan merebut pangsa pasar di Asia Tenggara dalam waktu cepat. Tetapi, untuk mampu merebut daya saing pasar Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Akhir Tahun 2015, tentu diperlukan dukungan perangkat lain seperti regulasi, kebijakan, kapasitas kelembagaan dan

sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi, dukungan anggaran dan peranserta seluruh *stakeholder* serta partisipasi masyarakat secara terpadu dan terintegrasi.

Berbagai prioritas program pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara garis besar diilustrasikan melalui capaian kinerja 4 (empat) bidang yaitu Industri, Perdagangan, Investasi dan Infrastruktur.

Pertama, Bidang Industri. Untuk dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan prioritas program pembangunan bidang industri melalui program pengembangan industri kecil dan menengah, program penataan struktur industri, program peningkatan kapasitas teknologi industri, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program peningkatan standarisasi industri, serta program peningkatan industri berbasis sumber daya alam.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB lapangan usaha industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai 536,47 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 28,92 persen terhadap PDRB ADHB Jawa Timur yang mencapai nilai sebesar 1.855,04 triliun rupiah pada tahun 2016. Lebih tinggi jika dibanding pada tahun 2015 yang mencapai 495,69 triliun rupiah atau 29,28 persen dari

total capaian sebesar 1.692,90 triliun rupiah.

Peran produk industri pengolahan sangat mendominasi kinerja ekspor non migas di Jawa Timur tercatat nilai pada sektor industri selama tahun 2016 sebesar 16,44 miliar dolar AS lebih atau berkontribusi sebesar 91,62 persen terhadap nilai ekspor non-migas yang mencapai 17,94 miliar dolar AS lebih pada tahun 2016. Sedang pada tahun 2015 tercatat nilai pada sektor industri sebesar 15 miliar dolar AS lebih atau mengalami perubahan sebesar 9,54 persen dibanding tahun 2016.

Prosentase industri yang telah menerapkan Standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2.103 unit atau sebesar 10,3 persen dari jumlah total industri formal sebanyak 20.467 unit atau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,5 persen.

Kedua, Bidang Perdagangan. Untuk meningkatkan kontribusi bidang perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan prioritas program pembangunan meliputi program peningkatan ekspor dan pengendalian impor, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, serta program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Pada tahun 2016 ekspor nonmigas Jawa Timur naik menjadi sebesar 17,94 miliar dolar AS lebih sedangkan impor non migasnya sebesar 15,68 miliar dolar AS lebih sehingga nilai

ekspor bersih perdagangan pada tahun 2016 masih surplus sebesar 2,26 miliar dolar AS lebih yang melebihi targetnya sebesar 1,11 miliar dolar AS lebih. Sedangkan Tahun 2015 Nilai ekspor non migas Jawa Timur mencapai 16,49 miliar dolar AS lebih, sedangkan nilai impor nonmigas pada periode yang sama tahun 2015 mencapai 15,65 miliar dolar AS lebih maka nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2015 mengalami surplus sebesar 840,09 juta dolar AS lebih. Sehingga net ekspor non migas mengalami kenaikan dari 840,09 juta dolar AS lebih di tahun 2015 menjadi 2,26 miliar dolar AS lebih di tahun 2016 atau naik sebesar 169,36 persen.

Pertumbuhan Ekspor nonmigas pada tahun 2016 naik 8,77 persen dibanding tahun 2015, yakni dari 16,49 miliar dolar AS lebih pada 2015 naik menjadi 17,94 miliar dolar AS lebih. Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh *stakeholder*, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2014 dibanding tahun 2015 adalah sebesar 6 persen atau menjadi sebesar 243,01 triliun rupiah lebih. Sedang pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2016 sebesar 5,81 persen atau menjadi sebesar 257,12 triliun rupiah lebih.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Berdasarkan data BPS, dari sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Timur tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yakni sebesar 12,83 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen net ekspor antardaerah sebesar 9,58 persen.

Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri tahun 2016 yang sebesar 100,56 triliun rupiah naik sebesar 6,43 persen jika dibandingkan dengan nilai pada 2015 yang mencapai 94,48 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, serta peningkatan wisatawan domestik yang berlibur di Jawa Timur pada akhir tahun.

Ketiga, Bidang Investasi. Dalam upaya mewujudkan Misi kedua, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan prioritas program pembangunan. Meliputi program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pembangunan *East Java Investment Super Corridor* (EJISC),

serta program peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

Salah satu indikator pertumbuhan investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal yang dicatat dalam PMTB meliputi bangunan dan non bangunan. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 sebesar 4,37 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 5,73 persen. Lalu, pada tahun 2016 PMTB tumbuh 6,02 persen.

Keempat, Bidang Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan program pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang dilaksanakan secara proporsional dan berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan infrastruktur secara umum, antara lain diilustrasikan dengan meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tercermin dari kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR Nomor: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan

Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi.

Perubahan ini terkait adanya perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan nasional. Saat ini jalan provinsi di Jawa Timur adalah sepanjang 1.421 Km.

Peningkatan jalan provinsi dapat ditunjukkan dari besarnya persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis dalam sistem jaringan jalan primer yang pada tahun 2015 adalah sebesar 56,87 persen dan pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,03 poin. Capaian tersebut meningkat karena ada peningkatan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 27,49 km dengan lebar jalan minimal 7 meter.

Selanjutnya, dengan meningkatnya penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 persen dan pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,86 poin. Peningkatan capaian tersebut terjadi karena ada pembangunan Jalan Lintas Selatan di ruas Bts. Kab. Lumajang – Mayangan (3,2 Km) dan ruas Mayangan – Puger (2,8 Km) melalui dukungan dana APBN.

Berikutnya, Infrastruktur Jaringan Irigasi. Pembangunan jaringan irigasi di Jawa Timur tahun 2016 bertujuan meningkatkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil serta mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir.

Program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah program konservasi sumber daya air dengan indikator sasaran volume resapan air. Pada tahun 2016 indikator ini mencapai sebesar 36 juta m³ lebih dan meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 11,78 juta m³ lebih. Kemudian, untuk program pendayagunaan sumber daya air dengan indikator sasaran program ketersediaan air baku ada sedikit kenaikan, pada tahun 2015 sebesar 19,41 milyar m³ lebih pada tahun 2016 meningkat sebesar 19,48 milyar m³ lebih.

Adapun pembangunan **Infrastruktur Transportasi Perhubungan** bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan sektor transportasi, penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peranan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bidang transportasi.

Sebagai ilustrasi capaian pembangunan infrastruktur

transportasi dalam rangka menghadapi persaingan MEA dapat dilihat peningkatan prasarana perhubungan udara di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi melaksanakan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi udara hasilnya antara lain dapat dilihat dari indikator sasaran program prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang pada tahun 2015 sebesar 7,97 persen. Lalu pada 2016 sebesar 27,09 persen atau naik sebesar 19,12 poin.

2. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk melihat peningkatan kesejahteraan dalam konteks ekonomi adalah manakala terdapat peningkatan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Namun, meningkatnya pendapatan penduduk tersebut seharusnya merata dan dirasakan semua lapisan strata sosial masyarakat. Artinya, bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, pemerataan pendapatan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat digunakan Indeks Gini. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Berdasarkan data BPS, nilai Indeks Gini di Jawa Timur tahun 2015 sebesar 0,40. Kemudian pada 2016 nilainya tidak

mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,40. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Timur masih dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5).

Capaian ini merupakan representasi kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas pemerataan pendapatan ditengah lambannya perekonomian global dan nasional. Ke depan kami akan terus berupaya konsisten melaksanakan prioritas program pembangunan dan fokus ke arah peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Upaya ini tentu akan melibatkan seluruh stakeholder, utamanya peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah.

Untuk mendorong percepatan peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan menengah berbagai prioritas program pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diantaranya melalui program pembangunan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan. Tujuannya, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, meningkatkan swadaya dan

partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Sidang Dewan Yang Terhormat, berikutnya:

3. Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dihitung dengan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

- a. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan pemerataan pendapatan versi bank dunia penduduk Jawa Timur yang berpendapatan 40 persen terendah pada tahun 2015 sebesar 16,61 persen (katagori ketimpangan sedang), kemudian meningkat sebesar 17,03 persen pada tahun 2016 (katagori ketimpangan rendah).

Capaian kinerja peningkatan pemerataan pendapatan versi bank dunia tersebut juga tercermin dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga di Jawa Timur yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 3,36 persen, meningkat pada 2016 menjadi 4,55 persen atau terjadi peningkatan sebesar 35,42 persen. Kenaikan ini selaras dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur pada 2016

yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat disebabkan oleh terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi persoalan kemiskinan dilakukan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan beberapa jajaran Pemerintahan Daerah terkait serta instansi lintas sektor yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan permasalahan kemiskinan.

Dalam dua tahun terakhir pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatasi kemiskinan secara perlahan terus membaik. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,7 juta jiwa lebih, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,64 juta jiwa. Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 60 ribu jiwa.

Penurunan ini tentu tidak terlepas dari upaya keras Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai program

prioritas pembangunan yang dilaksanakan, diantaranya program pemberdayaan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program bantuan dan perlindungan sosial, program pengembangan kesejahteraan sosial, program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, serta program unggulan seperti Jalinmatra, *anti poverty program*, Bosdamadin, bantuan keuangan siswa miskin, pembangunan rumah tidak layak huni, rumah susun sederhana sewa dan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang selalu terjadi di negara manapun, baik itu negara yang sudah maju maupun negara berkembang. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Tolak ukur untuk mengetahui jumlah pengangguran digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap

jumlah angkatan kerja khususnya penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Berdasarkan data BPS, indikator TPT Jawa Timur tahun 2016 mencapai sebesar 4,21 persen, menurun sebesar 0,26 poin bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,47 persen. Angka capaian ini cukup baik, mengingat kondisi perekonomian nasional dan daerah yang belum pulih tentunya berpengaruh besar terhadap realisasi investasi di Jawa Timur sehingga sedikit banyak telah menghambat penyerapan angkatan kerja secara signifikan.

Capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 5,82 persen ini setidaknya merupakan cerminan dari pelaksanaan kebijakan pengurangan pengangguran dengan tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif guna mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. Sasarannya adalah meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja; meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal; meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja; juga meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) dan perlindungan pekerja/buruh.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2016 diilustrasikan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Capaian kinerja program ini dapat dilihat dari indikator prosentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan/kompetensi. Pada tahun 2015 adalah sebesar 90,81 persen, lalu pada 2016 sebesar 94,9 persen (naik 4,50 persen). Peningkatan tersebut diperoleh dari jumlah lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi sebanyak 2.629 orang untuk tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2015 yang hanya sebesar 1.324 orang. Sedangkan yang lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk 2016 sebanyak 2.770 orang. Adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya melalui program peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal dengan indikator prosentase pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2015 sebesar 62,50 persen, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 67,23 persen atau mengalami kenaikan sebesar 7,57 persen. Peningkatan ini merupakan komitmen *stakeholder* untuk memberikan pelayanan secara optimal di Bidang Ketenagakerjaan serta adanya ikon program/kegiatan unggulan yang mendorong penempatan dan penyerapan tenaga kerja.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Mengingat manusia dalam perkembangan pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek dan obyek pembangunan. Artinya, pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat agar dapat hidup secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup komponen umur panjang dan sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH); kemudian komponen pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, dan komponen kehidupan yang layak diukur dengan Indeks Daya Beli Masyarakat. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Berdasarkan kriteria rumusan secara keseluruhan capaian kinerja IPM di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2014-

2016) menunjukkan tren peningkatan. Pada 2014 angka IPM sebesar 68,14, selanjutnya meningkat menjadi 68,95 pada tahun 2015, lalu pada 2016 menjadi 69,75 (angka sangat sementara). Peningkatan indeks pembangunan manusia ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas pembangunan masyarakat Jawa Timur.

Selanjutnya berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi ketiga dimensi IPM tersebut masing-masing saya sampaikan sebagai berikut.

Pertama, pada indeks pendidikan hasilnya dilihat dari Indikator Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 7,23 tahun dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 7,14 tahun. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 1,26 persen. Kemudian, tampak dari Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar tahun 2016 adanya peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar 94,76 persen, lalu pada 2016 sebesar 95,07 persen. Selanjutnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah juga meningkat pada 2015 sebesar 79,14 persen, lalu tahun 2016 naik menjadi 81,42 persen.

Kedua, IPM dari kontribusi Indeks Kesehatan di Jawa Timur ditunjukkan dari peningkatan Angka Harapan Hidup tahun 2015 sebesar 70,68; lalu meningkat menjadi 70,74 pada tahun 2016. Kemudian, dari upaya penanggulangan masalah gizi yang optimal melalui program perbaikan gizi masyarakat, tampak dari

persentase balita kurang gizi tahun 2015 sebesar 17,8 persen turun menjadi sebesar 17,3 persen pada tahun 2016.

Selain itu, dilihat dari capaian program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator persentase rumah tangga sehat, pada 2015 sebesar 50,62 persen; lalu naik menjadi sebesar 52,77 persen pada 2016. Kemudian dari persentase posyandu di Jawa Timur tahun 2015 sebesar 67,58 persen pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 70,66 persen. Selain itu, dari Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2015 yang sebesar 24 per 1000 kelahiran menjadi 23,6 per 1000 kelahiran hidup pada 2016, mengalami penurunan. Hal ini terjadi, salah satunya, karena keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif antara *stakeholder* kesehatan serta hadirnya tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan.

Ketiga, Indeks Daya Beli adalah kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). Semakin tinggi indeks ini, maka semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan program pembangunan wilayah dengan model agropolitan. Yaitu konsep wilayah agraris yang maju didukung oleh pertanian yang modern

dengan konektivitas antar sektor dan daerah yang baik. Hal ini mengingat sekitar 36 persen lapangan pekerjaan utama di Jawa Timur adalah sektor pertanian. Model Agropolitan akan membantu daerah agraris menjadi lebih maju karena usaha pertanian dari hulu ke hilir terkoneksi dengan baik. Pertanian tidak hanya bergerak pada sisi *on farm*, tetapi juga berkembang pada sisi *off farm*. Menjual produk pertanian tidak hanya berwujud barang mentah, tetapi juga yang bersifat olahan.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Tujuan IPG adalah untuk memberikan informasi mengenai pembangunan yang sudah menggunakan konsep gender dengan pencapaian kualitas hidup penduduk yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, IPG digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, namun lebih memperhatikan peran gender.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 90,83, kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi 91,07 pada tahun 2015 dan 91,77 (angka sangat sementara) pada tahun 2016.

Semakin naiknya angka IPG ini, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-lakinya, juga ditopang oleh peran perempuannya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah sosial ekonomi, sehingga disparitas SDM antara laki-laki dan perempuan di Jawa Timur dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kemajuan Jawa Timur bisa dinikmati oleh siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan, di segala bidang kesehatan, pendidikan bahkan dalam kesetaraan ekonomi.

8. Kualitas Air Sungai (BOD dan COD)

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam berbagai aktivitas. Mutu atau kualitas air sangat baik bagi kelangsungan hidup manusia. Air yang bersih dan sehat diperlukan manusia untuk dikonsumsi sebagai air minum dan kebutuhan sehari – hari.

Salah satu kriteria kualitas air adalah derajat keasaman (pH). Pada dasarnya, air yang baik adalah air yang tidak tercemar. Dalam kondisi demikian, berarti air bersifat netral, sedangkan apabila di dalam perairan terdapat zat pencemar, sifat air dapat berubah menjadi asam atau basa.

Berdasarkan kriteria rumusan tersebut diperoleh capaian

indikator Kualitas Air Sungai di Jawa Timur *indikator Biological Oxygen Demand* (BOD) tahun 2015-2016 dari sebesar 4,14 miligram per liter menjadi 4,52 miligram per liter, sedangkan untuk *Chemical Oxygen Demand* (COD) tahun 2015-2016 dari sebesar 11,88 miligram per liter menjadi 12,11 miligram per liter. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah industri dan air limbah domestik yang belum tertangani.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas air sungai melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tercermin dari indikator persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air pada tahun 2016 sebesar 39,29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,35 persen. Kemudian, indikator persentase ketaatan usaha atau kegiatan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan pada tahun 2016 mencapai 74,21 persen; sedangkan pada 2015 mencapai 69,57 persen. Selanjutnya, dari indikator persentase penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan sanksi administrasi, pada tahun 2016 terdapat 4 kasus lingkungan yang ditangani dan sudah ada tindak lanjutnya berupa rekomendasi sanksi administratif yang disampaikan ke instansi yang berwenang. Kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan sanksi administratif tahun 2015 telah terselesaikan 100 persen dan tahun 2016 juga terselesaikan 100 persen.

Dengan demikian capaian kinerja 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur tahun 2016 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) IKU mengalami peningkatan capaian kinerja kearah perbaikan antara lain Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pendapatan Versi bank Dunia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender. Pada Indikator Indeks Gini dapat dipertahankan capaiannya, sedangkan untuk Indikator Kualitas Air Sungai terjadi penurunan. Memperhatikan beberapa indikator yang menurun pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berupaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang dengan capaian yang lebih baik serta mampu mencapai diatas rata-rata nasional.

RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

Berikutnya BAGIAN KEDUA yaitu,

**PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DITERIMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016**

Kami menyadari bahwa penghargaan memang bukan satu-satunya alat ukur penilaian keberhasilan kinerja seorang gubernur di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada tahun 2016 kemarin kami telah menerima 24 (duapuluh empat) penghargaan dari berbagai bidang, kami memahami sepenuhnya bahwa perolehan penghargaan itu merupakan kerja keras kita bersama baik Pemerintah Daerah,

peranserta para pemangku kepentingan, dan juga partisipasi dari seluruh unsur dan elemen masyarakat Jawa Timur yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sehingga Jawa Timur terus berkembang dan semakin lebih maju dari Provinsi lain yang setingkat.

Pemberian penghargaan menurut kami merupakan entitas atau bentuk apresiasi kepercayaan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat luas dalam menilai kinerja kami sebagai seorang kepala daerah yang dinilai mampu menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban di daerah secara bersama-sama dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penghargaan yang kami terima tahun 2016 baik dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kementerian/lembaga maupun Institusi yang berkompeten terhadap standarisasi kinerja, kami berharap kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat dalam konteks fungsi pengawasan DPRD Provinsi sebagai mitra kesejajaran pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur agar dapatnya penghargaan ini diapresiasi sebagai “salah satu” alat ukur penilaian kinerja seorang gubernur yang mencerminkan capaian kinerja terhadap upaya pencapaian target 8 (delapan) IKU Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga, penghargaan yang kami peroleh, lahir dari komitmen kami sebagai seorang kepala daerah dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah

sebagaimana ditetapkan setiap tahun dalam RPKD.

Berkaitan dengan penghargaan tersebut, pada kesempatan ini saya sampaikan berbagai jenis penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Untuk ringkasnya kami rangkum ke dalam 8 (delapan) kelompok bidang penghargaan meliputi bidang politik, bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang pembangunan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi, serta bidang lingkungan. Selengkapnya kami bacakan sebagai berikut:

Pertama, Penghargaan Bidang Politik

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 2 (dua) penghargaan yaitu:

1. Pada tanggal 30 Nopember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia**”, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dianggap berhasil mengembangkan demokrasi dan menjaga stabilitas politik yang kondusif.
2. Pada tanggal 8 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Provinsi Peduli HAM**”, yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada acara Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 yang diselenggarakan di Gedung Negara Graha di Surabaya.

Penghargaan ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai sangat antusias dan serius dalam menangani masalah HAM di daerah, ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan serupa bagi 38 Bupati dan Walikota se Jawa Timur.

Kedua, Penghargaan Bidang Pemerintahan

Di Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 5 (lima) penghargaan meliputi reformasi birokrasi, inovasi publik, administrasi kepegawaian, standar pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

1. Pada tanggal 26 Mei 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus menerima penghargaan "**BKN AWARD 2016 Juara II untuk Kategori Pemerintah Provinsi**" bidang Pengelola kepegawaian Terbaik Instansi Pusat dan Daerah. Pencapaian kinerja bidang pengelolaan kepegawaian terbaik kedua ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dalam tubuh Perangkat Daerah (PD) terus dilakukan kearah perbaikan birokrasi yang semakin efektif dan efisien. Karena dengan sistem kepegawaian yang baik tentunya memberikan sistem pelayanan yang baik terhadap kepentingan internal secara administratif. Diharapkan, dengan sistem administrasi kepegawaian yang semakin atau tertib administrasi baik keperluan yang sifatnya internal untuk berbagai kepentingan yang strategis berdampak terhadap tingkat kenyamanan pegawai dalam organisasi

pemerintahan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kinerja pegawai.

2. Pada tanggal 31 Maret 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima penghargaan "**Jatimnomics sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik**" yang diserahkan di Surabaya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai representasi pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan karena Jatimnomics dinilai menjadi solusi menghadapi ekonomi global.
3. Keberhasilan memperoleh penghargaan inovasi pelayanan publik tersebut diperkuat dengan diterimanya penghargaan bidang sejenis, pada tanggal 26 Mei 2016 sebagai "**Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016**", yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta. Bentuk apresiasi dari Pemerintah ini sekaligus memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap langkah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam memberikan tingkat pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, cepat, mudah serta murah.
4. Pada tanggal 7 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "**Kepatuhan Tertinggi terhadap Standar Pelayanan Publik**" kategori Pemerintah Provinsi, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta.

5. Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Keterbukaan Informasi Publik 2016 Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Tingkat Nasional**”, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Ketiga, Penghargaan Bidang Keuangan

Pada tanggal 15 Januari 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah**”, yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewakili pemerintah pusat. Penghargaan ini mencerminkan bahwa Jawa Timur mampu menjadi pelopor bagi Provinsi lain di Indonesia berkat inovasi yang dilakukan terhadap 3 (tiga) hal yaitu memelopori wilayahnya melalui kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi satu, dimiliki oleh pemerintah daerah. Juga pendirian Asosiasi Pengusaha Exportir (APEX) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta mampu mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui optimalisasi peran Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA).

Keempat, Penghargaan Bidang Pembangunan

Pada tanggal 1 Maret 2016 menerima penghargaan “**Program Sustainable Development's Goals (SDG's)**”, yang diserahkan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) atas nama Pemerintah Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu memberikan dukungan riil yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan.

Kelima, Penghargaan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pada tanggal 7 Maret 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "**Peringkat Pertama atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015**", yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penghargaan ini mendeskripsikan bahwa upaya penanganan secara terpadu terhadap konflik sosial yang ada di Jawa Timur dapat dilakukan dengan baik melalui penyusunan rencana aksi yang efektif dan efisien. Peran Pemerintah Provinsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan antarelemen dan unsur serta keterlibatan seluruh *stakeholder* dapat dilakukan dengan baik sehingga capaian kinerjanya memperoleh hasil positif.

Keenam, Penghargaan Bidang Sosial Kemasyarakatan

Di Bidang Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 7 (tujuh) penghargaan, yaitu:

1. Pada tanggal 26 Juli 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan **sebagai daerah yang memiliki Dukungan Bagi Pengembangan Sukarelawan PMI**, yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di

Provinsi Sulawesi Selatan. Apresiasi ini memberikan makna bahwa secara merata warga Masyarakat di Jawa Timur memiliki rasa kepekaan sosial kemanusiaan yang sangat tinggi terhadap makhluk sesama terbukti dengan adanya tingkat kepedulian kepada makhluk sesamanya.

2. Pada tanggal 9 September 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "**Tokoh Peduli Olahraga**", yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional ke 33 Tahun 2016 di GOR Delta Sidoarjo.
3. Pada tanggal 4 Oktober 2016 Menteri Sosial memberikan penghargaan "**Peringkat Pertama Tingkat Nasional Sebagai Penggiat Upaya Kesejahteraan Sosial Lansia Tahun 2016**".
4. Pada tanggal 16 Oktober 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "**Dharma Widya Argya (Pengabdian Insan Kemanusiaan)**", yang diserahkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada acara puncak Tangguh Award 2016 di Manado, Sulawesi Utara.
5. Pada tanggal 1 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "**Peduli Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS**", yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan pada acara Puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan atas upaya pencapaian akses universal layanan tes HIV dan

pengobatan *antiretroviral* di semua kabupaten/kota se Jawa Timur.

6. Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Satya Lencana Kebaktian Sosial**”, yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada acara Puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2016 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Satya Lencana Kebaktian Sosial adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan Presiden sebagai penghargaan kepada warga Negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang perikemanusiaan.
7. Pada tanggal 21 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Anugerah Parahita Ekapraya**”, kategori mentor yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta. Perhargaan ini didapat karena upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah di bidang pengarusutamaan gender dengan melakukan strategi yang rasional dan sistematis untuk mencapai serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia.

Ketujuh, Penghargaan Bidang Ekonomi

Di Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 4 (empat) penghargaan yaitu:

1. Pada tanggal 4 Agustus 2016 di Jakarta Pemerintah Provinsi

Jawa Timur menerima Penghargaan "**Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) Inovatif Tingkat Provinsi**", yang diserahkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Timur yang mampu menjaga tingkat inflasi, sehingga harga beberapa komoditas di daerah Jawa Timur tetap terkendali dan tidak menimbulkan gejolak keresahan di masyarakat.

2. Pada tanggal 11 Agustus 2016 di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan yang diterimakan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai representasi pemerintah pusat diberikan kepada gubernur yang merupakan bentuk apresiasi yang tinggi sebagai "**Kepala Daerah Inovatif**" pada 2016. Apresiasi kategori A plus ini merupakan bentuk kepercayaan yang tinggi dari pemerintah kepada Provinsi Jawa Timur.
3. Pada tanggal 11 Agustus 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima penghargaan di Bidang Ekonomi yang diterimakan oleh Sekjen Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat, berupa "**Piagam Penghargaan atas Komitmen terhadap ISEI serta sumbangsih pikiran yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif**" di Jawa Timur. Apresiasi ini merupakan wujud tingginya tingkat kepercayaan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mampu

mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan industri kecil dan menengah di tengah masih lambannya dan melemahnya perekonomian global dan nasional.

4. Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Anugerah Cinta Karya Bangsa Tahun 2016**”, yang diserahkan oleh Menteri Perindustrian di Jakarta. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati peringkat Pertama tentang Pemanfaatan Produk Dalam Negeri.

Kedelapan, Penghargaan Bidang Lingkungan

Di Bidang Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 3 (tiga) penghargaan yaitu:

1. Pada tanggal 23 Juli 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan sebagai "**Peringkat Pertama Nasional Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2016**", yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Riau. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Jawa Timur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan secara keseluruhan dengan melalui peran Pemerintah Provinsi yang mampu menggalang keterlibatan langsung masyarakat Jawa Timur untuk aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sehingga membawa Jawa Timur sebagai daerah yang aman dan

nyaman untuk menjadi tempat tinggal yang sehat secara berkelanjutan.

2. Pada tanggal 4 Agustus 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima “**Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2016**”, sebagai juara ke-2, yang diserahkan oleh Menteri ESDM pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Ke-5 Tahun 2016 di Hotel Bidakara Jakarta.
3. Pada tanggal 28 Nopember 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan “**Penanaman Pohon yang Berkesinambungan**”, yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2016 di Tuban Jawa Timur.

Dengan diterimanya 24 (duapuluh empat) jenis penghargaan yang meliputi 8 bidang penghargaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016, hal ini apabila dikumulatikan waktunya, dapat dimaknai bahwa dalam setiap bulannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 2 (dua) jenis penghargaan berstandar nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya apresiasi yang diterima Pemerintah provinsi Jawa Timur dari berbagai institusi pemerintahan maupun institusi yang berkompeten, hal ini merupakan entitas tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap capaian kinerja kepala daerah bersama seluruh *stakeholder* serta peranserta langsung masyarakat Jawa

Timur dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Atas semua penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, kami tidak bermaksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang masih ditemui di dalam pencapaian kinerja untuk memenuhi target kinerja utama Jawa Timur tahun 2016 khususnya terhadap IKU yang masih belum signifikan pencapaiannya.

Kami berharap kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, realisasi pencapaian terhadap 8 (delapan) target kinerja utama Jawa Timur dapat dimaknai tercermin dari perolehan penghargaan yang telah diterima. Walaupun secara substansi tidak relevan langsung, dari sisi yang lain masih memiliki keterkaitan sebagai salah satu variabel pendukung yang bernilai signifikan.

SIDANG DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT,

Demikian beberapa hal pokok dari seluruh rangkaian substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2016 yang kami sampaikan kepada Yang Terhormat segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nota Pengantar Penjelasan ini merupakan laporan secara garis besar dari seluruh laporan tahunan kami kepada DPRD Provinsi yang sekaligus satu rangkaian laporan dengan substansi Bab I sampai dengan Bab VII beserta Lampiran Matrik Capaian Kinerja seluruh Perangkat Daerah.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh rangkaian laporan ini dapat dicermati dengan seksama, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan kritik yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki dan menindaklanjuti sesuai yang diharapkan oleh segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Karena itu, dalam melakukan pencermatan nanti apabila ditemukan beberapa kekurangan yang terkait dengan substansi materi laporan maupun kesalahan yang bersifat redaksional, yang semua itu merupakan kekurangan kami sebagai manusia biasa, kami beserta seluruh jajaran kepala perangkat daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 yang dapat kami sampaikan kepada Ketua Dewan, Para Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat.

***Billaahii Taufiq Wal Hidayah,
Wass. Wr. Wb. dan Selamat Siang.***

Surabaya, 27 Maret 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO